

PENGARUH DANA TRANSFER KE DESA TERHADAP NILAI INDEKS DESA MEMBANGUN DI KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

Dyah Yuni Lestari^{1*}, Muhammad Imron², Mintarti Indartini³

¹Program Studi Manajemen, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Pandean Kota Madiun, 63133

E-mail: dyah.yl73@gmail.com

²Program Studi Manajemen, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Pandean Kota Madiun, 63133

E-mail: muhammadmimron@unmer-madiun.ac.id

³Program Studi Manajemen, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Pandean Kota Madiun, 63133

E-mail: mintarti@unmer-madiun.ac.id

Abstrak---- Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana transfer yang terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa dan bantuan keuangan provinsi. Penggunaan anggaran tersebut melatar belakangi lahirnya Indeks Desa Membangun yang merupakan salah satu instrumen untuk memotret perkembangan kemandirian desa. Kota Banjar Provinsi Jawa Barat merupakan satu-satunya kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki desa dengan nilai Indeks Desa Membangun yang relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana transfer terhadap Indeks Desa Membangun di tahun yang bersangkutan. Data diperoleh dari website Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2024. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda dengan software minitab 21. Hasil analisis menyatakan bahwa dana desa tidak berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun, sedangkan bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

Kata kunci : *Dana transfer ke desa dan Indeks Desa Membangun*

Abstract— One of the sources of village income is transfer funds, which consist of village funds, tax and retribution sharing, village fund allocations, and provincial financial assistance. The use of that budget underlies the birth of the Village Development Index, which is one of the instruments to capture the development of village independence. Banjar City in West Java Province is the only city in West Java Province that has villages with relatively high Indeks Desa Membangun scores. This research aims to determine the effect of transfer funds on the Developing Village Index in the relevant year. Data were obtained from the website of the Ministry of Development of Disadvantaged Villages and Transmigration for the year 2024. Data analysis was conducted using multiple linear regression with Minitab 21 software. The analysis results indicate that village funds do not affect the Developing Village Index, whereas tax and retribution sharing as well as village fund allocation significantly affect the Developing Village Index.

Keywords: *Village transfer funds and Developing Village Index*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Merupakan sebuah tantangan besar dalam memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayahnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan dana transfer ke daerah dan dana desa. Kebijakan ini dirancang untuk mendistribusikan anggaran negara ke seluruh pelosok negeri, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah dan desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapatan desa yang salah satu sumbernya dari dana transfer ke daerah merupakan modal pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dana transfer ke desa dimaksud terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa dan bantuan keuangan provinsi. Penggunaan besarnya anggaran yang dikelola oleh desa melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Memangun (IDM) yang merupakan salah satu instrumen untuk memotret perkembangan kemandirian desa. Indeks Desa Memangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi atau lingkungan.

Kota Banjar merupakan daerah otonomi baru, pemekaran dari Kabupaten Ciamis yang diresmikan pada tanggal 21 Februari 2003. Berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2002. Kota Banjar merupakan satu-satunya kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki desa. Terdapat 16 desa di Kota Banjar, yang dalam 5 tahun terakhir keseluruhannya mendapatkan nilai indeks desa membangun relatif tinggi. Bertitik tolak pada penjelasan tersebut penelitian ini bermaksud menggali pengaruh dana transfer terhadap nilai Indeks Desa Memangun pada tahun bersangkutan yaitu tahun 2024 di Desa Banjar Provinsi Jawa Barat. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah menganalisis pengaruh dana transfer ke desa terhadap nilai indeks desa membangun, namun belum ada yang meneliti dan menganalisis seluruh sumber dana transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan provinsi) ke desa terhadap nilai Indeks Desa Memangun. Selain itu belum ada penelitian yang meneliti pengaruh dana transfer pada tahun bersangkutan terhadap nilai Indeks Desa Memangun.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh dana transfer ke desa yang terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa dan bantuan keuangan provinsi terhadap nilai Indeks Desa Memangun di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat baik secara parsial maupun bersamaan”.

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dana transfer yang terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa serta bantuan keuangan provinsi terhadap nilai Indeks Desa Memangun di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

II. TINJAUAN TEORITIS**A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Seliman, Yacoub, Yani (2023) yang meneliti Pengaruh Transfer Pusat dan Daerah Kepada Desa Terhadap Status Indeks Desa Memangun di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan variable dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi dengan data tahun 2017-2021. Hasil analisis membuktikan bahwa dana desa berpengaruh terhadap Indeks Dana Memangun, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi tidak berpengaruh terhadap Indeks Desa Memangun.
2. Halim dan Taryani (2023) meneliti Pengelolaan Dana desa dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Memangun Di Nusa Tenggara Timur. Hasil analisis penelitian ini menjelaskan bahwa prosentase dana desa tidak mempengaruhi nilai Indeks Desa Memangun tetapi penyerapan dan kecepatan penggunaan dana desa berpengaruh terhadap Indeks Desa Memangun.
3. Iftitah, Wibowo (2022) meneliti Pengaruh Dana desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Indeks Desa Memangun di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dana desa berpengaruh terhadap Indeks Desa Memangun dan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap Indeks Desa Memangun.
4. Adelian, Rohima, Mardalena (2022), meneliti Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Pembangunan Desa. Penelitian ini hanya melibatkan dana transfer ke desa yaitu alokasi dana desa dan hasil penelitian membuktikan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap Indeks Desa Memangun
5. Arina, Masinambow, dan Walewangko (2021), meneliti Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Memangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil analisis penelitian ini menyebutkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap Indeks Desa Memangun.
6. Muslihah, Siregar, (2019) meneliti Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis penelitian ini menyebutkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap Pembangunan fisik dan kesejahteraan Masyarakat.

B. Landasan Teori

Dana transfer adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa yang berasal dari kelompok transfer terdiri atas Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi dana desa, dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

Dana desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasayarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 adalah salah satu bagian pendapatan keuangan dari kelompok transfer yang bersasal dari pajak dan retribusi. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD) adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa. DBHPRD merupakan insentif untuk desa yang berasal dari capaian pajak dan retribusi

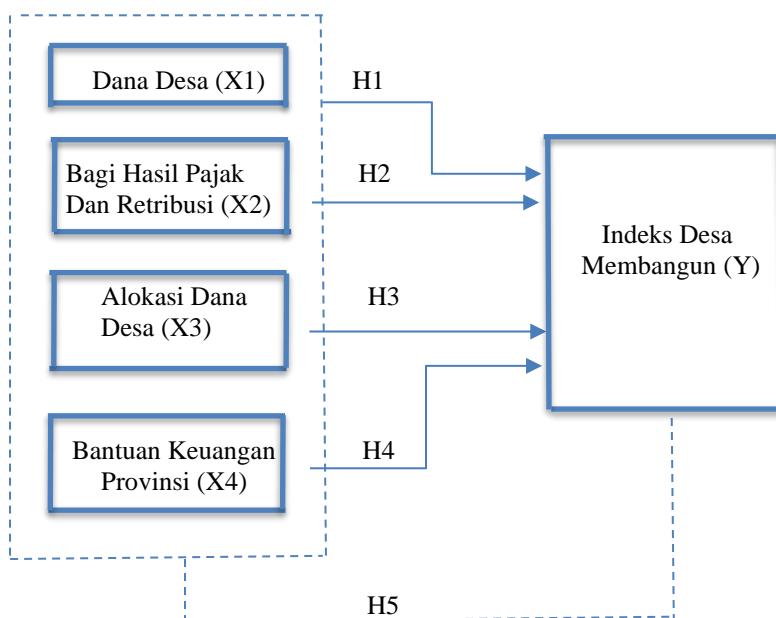
Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk pembangunan desa. . Besaran Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH).

Bantuan Keuangan Provinsi adalah bantuan dari pemerintah provinsi yang diberikan kepada pemerintah desa untuk membantu pembangunan,

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat penting untuk menilai kemajuan pembangunan desa di Indonesia. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk atas indeks ketahanan social, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi atau lingkungan. Indeks desa membangun mengklasifikasi desa menjadi lima status yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian Pengaruh Dana Transfer Ke Desa Terhadap Nilai Indeks Desa Membangun di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat meneliti semua elemen dana transfer yaitu dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan provinsi terhadap Indeks Desa Membangun dengan kerangka berpikir sebagai berikut :



D. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh dana desa terhadap indeks desa membangun di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
2. Terdapat pengaruh bagi hasil pajak dan retribusi terhadap indeks desa membangun di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
3. Terdapat pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
4. Terdapat pengaruh bantuan keuangan provinsi terhadap indeks desa membangun di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
5. Dana transfer ke desa yang meliputi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan provinsi berpengaruh terhadap indeks desa membangun di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kemandirian semua desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2024 melalui website (<http://www.idm.kemendesa.go.id>). Data dimaksud adalah data Indeks Desa Membangun dan dana transfer ke desa yang terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa serta bantuan keuangan dari provinsi tahun 2024.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda dengan bantuan program komputer software Minitab 21. Analisis deskriptif menggambarkan data yang terkumpul, sedangkan analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variable atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Secara rinci uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Uji deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Perhitungan statistik yang dihasilkan atas uji deskriptif adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata (mean)

Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data Penelitian ini dilakukan terhadap populasi, maka dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\mu = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{N} \quad \text{atau} \quad \mu = \frac{\Sigma X}{N}$$

Keterangan : Σ = lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan

X = variabel

N = banyaknya data populasi

μ = nilai rata-rata populasi

b. Nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi (maximum).

Nilai maksimum adalah suatu data yang mempunyai nilai paling besar, disimbulkan dengan X_{max} (Walpole, 1995).

Nilai minimum menunjukkan nilai terkecil suatu pengamatan, disimbulkan dengan X_{min} (Walpole, 1995).

2. Uji asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- jika signifikansi dibawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal,
- jika signifikansi diatas 0,05 maka data berdistribusi normal.

Cara lain untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji normal probability plot atau sering disebut dengan uji P-P Plot. Teknik analisis ini dilakukan pada nilai residual dalam model regresi. Menurut Imam Ghazali (2011) menjelaskan pedoman pengambilan keputusan dalam Uji Normal Probability Plot sebagai berikut :

- Jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti arah garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa nilai residualnya berdistribusi normal.
- Jika titik-titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residualnya tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksinya dengan cara melihat besaran dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan juga nilai Tolerance. Variabel dependen diregresi terhadap variabel independen. Tolerance mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya gejala multikolinearitas sebagai berikut :

- nilai Tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10,00$;
- nilai Tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10,00$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu suatu pengamatan ke pengamatan lain Ghozali (2016). Model regresi yang baik adalah Homokesdisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya heterokesdisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Dasar analisis adalah:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen yaitu dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi serta bantuan keuangan dari Provinsi terhadap variabel dependen yaitu Indeks desa membangun (Ghazali, 2018). Berikut persamaan regresi linier berganda yang digunakan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y	: indeks desa membangun
X_1	: dana desa
X_2	: bagi hasil pajak dan retribusi
X_3	: alokasi dana desa
X_4	: bantuan keuangan dari provinsi
a	: konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4	: Koefisien regresi
e	: variabel pengganggu

4. Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghazali (2012), “koefisien determinasi (R²) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen”. Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R-Squared (Ghazali 2016). Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati “1” artinya variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai mendekati “0” artinya variabel dependen memberikan informasi yang terbatas. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{R^2 = b_1 \Sigma x_1 y + b_2 \Sigma x_2 y + b_3 \Sigma x_3 y + b_4 \Sigma x_4 y}{Y}$$

Dimana:

R^2	: Koefisien determinasi linear berganda
$\Sigma x_1 y$: pengaruh dana desa
$\Sigma x_2 y$: pengaruh alokasi dana desa
$\Sigma x_3 y$: pengaruh bagi hasil pajak dan retribusi
$\Sigma x_4 y$: pengaruh bantuan keuangan dari Provinsi
Y	: keputusan konsumen
b_1, b_2, b_3, b_4	: koefisien regresi

5. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih perlu diuji. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) dan secara serempak (Uji F).

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghazali, 2018). Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

1) Merumuskan hipotesis null dan hipotesis alternatif

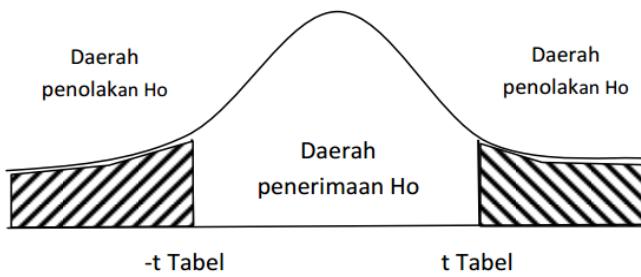
$H_0 : b_1, b_2, b_3, b_4 = 0$, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (x_1, x_2, x_3 , dan x_4) terhadap variabel terikat (Y).

$H_1 : b_1, b_2, b_3, b_4 \neq 0$, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (x_1, x_2, x_3 dan x_4) terhadap variabel terikat (Y).

2) Menentukan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi ditentukan dengan 5% dari derajat bebas ($dk = n - k$), untuk menentukan t tabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. digunakan dalam penelitian.

- 3) Menentukan daerah penerimaan dan penolakan



Gambar : Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t

Kriteria pengujian:

- H_0 ditolak jika, $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$
- H_0 diterima jika, $t_{table} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$

- 4) Menghitung t

$$t_{hitung} = \frac{b - f_l}{S_b}$$

Dimana:

- b : slope garis regresi
 f_l : pendugaan koefisien regresi
 S_b : standard error koefisien regresi

- 5) Kesimpulan H_0 ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Dan jika H_0 diterima, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen.
- b. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018) uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Derajat kepercayaan yang digunakan dalam uji statistik f adalah 0,05. Jika dalam pengujian nilai F hasil perhitungan lebih besar dari nilai f tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun langkah-langkah pengujianya sebagai berikut :

- 1) Menentukan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a)

H_0 : $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$, artinya tidak ada hubungan signifikan antara variabel (X_1, X_2, X_3, X_4) dengan variabel terikat (Y) secara simultan atau secara

Menentukan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a)

H_a : $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 \neq 0$, artinya tidak ada hubungan signifikan antara variabel (X_1, X_2, X_3, X_4) dengan variabel terikat (Y) secara simultan atau secara bersama-sama bersama-sama

- 2) Menentukan level signifikan (α), dengan $\alpha = 0,05$, df ($k-1$)($n-k$)

- 3) Menentukan kriteria pengujian :

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_0 ditolak artinya ada pengaruh signifikan bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, H_0 diterima artinya tidak ada pengaruh signifikan bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Menghitung nilai F

$$F = \frac{\frac{R^2}{k-1}}{\frac{(1-R^2)}{(n-k)}}$$

Dimana:

- R^2 : Koefisien determinasi
 K : Jumlah variable
 n : Jumlah sampel

- 6) Kesimpulan

H_0 ditolak atau H_0 diterima.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sejarah pembentukan Kota Banjar tidak terlepas dari sejarah berdirinya Pemerintah Kabupaten Ciamis di masa lalu. Banjar sejak didirikan sampai sekarang mengalami beberapa kali perubahan status. Adapun perubahan dimaksud sebagai berikut :

- Banjar sebagai ibukota kecamatan, dimulai tahun 1937 sampai dengan tahun 1940.
- Banjar sebagai ibukota kewadanaan, dimulai tahun 1941 sampai dengan 1 Maret 1992.
- Banjar sebagai kota administratif, dimulai tahun 1992 sampai dengan tanggal 20 Februari 2003.
- Banjar sebagai kota dimulai tanggal 21 Februari 2003.

Wilayah Kecamatan Banjar menunjukkan perkembangan dan kemajuan dengan ciri dan sifat kehidupan perkotaan. Selain itu keadaan geografis, demografis dan sosial kehidupan masyarakat yang menunjukkan perkembangan sangat pesat memerlukan peningkatan pelayanan dan pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Atas dasar hal tersebut wilayah Banjar perlu ditingkatkan menjadi kota administratif yang memerlukan pembinaan serta pengaturan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara khusus. Akhirnya pada tahun 1992 pemerintah membentuk Banjar Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 tentang Pembentukan Banjar Kota Administratif. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 2 Maret 1992. Berdasarkan peraturan tersebut

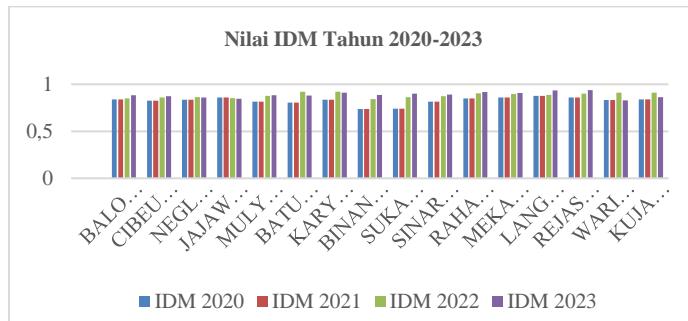
Kota Banjar terdiri dari 4 kecamatan, 16 desa dan 9 kelurahan.

Kota Banjar terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah kurang lebih 113,49 km² atau 11.349 Ha. Sementara berdasarkan pengukuran pada Peta Rupa Bumi Bakosurtanal, luas wilayah Kota Banjar adalah 13.197,23 Ha, dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Cisage (Kabupaten Ciamis), Kecamatan Dayeuhluhur dan Kecamatan Wanaraja (Kabupaten Cilacap).
- Sebelah timur : Kecamatan Lakbok (Kabupaten Ciamis), Kecamatan Wanareja (Kabupaten Cilacap).
- Sebelah selatan : Kecamatan Cimargas, Kecamatan Pamarican, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Lakbok (Kabupaten Ciamis).
- Sebelah barat : Kecamatan Cimargas dan Kecamatan Cijeunjing (Kabupaten Ciamis).

Secara geografis Kota terletak di antara 07019'30" – 07026'30" Lintang Selatan dan 108028'00" – 108040'00" Bujur Timur. Dan secara administratif, Kota Banjar terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman serta Kecamatan Langensari.

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam indikator terkini Kota Banjar tahun 2020, jumlah penduduk Kota Banjar pada Tahun 2020 mencapai 205.482 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,53 persen. Perekonomian Kota Banjar dapat dilihat dari kenaikan laju pertumbuhan ekonomi PDRB yaitu 7,20% pada tahun 2019 menjadi 9,40% pada tahun 2020. Selain itu perekonomian Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari kemandirian Kota Banjar Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan melalui nilai Indeks Desa Membangun yang dicapai oleh seluruh desa di Kota Banjar. Berikut nilai Indeks Desa Membangun desa-desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.



Gambar : Grafik Nilai IDM Kota Banjar Tahun 2020-2023

B. Analisis data

1. Analisis deskriptif dana transfer ke desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

Tabel : Deskriptif Nilai IDM, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Serta Alokasi Dana Desa

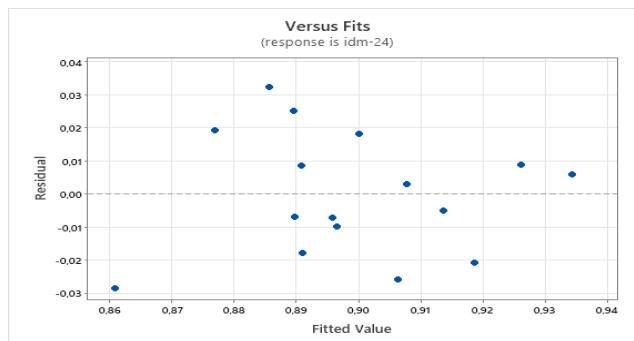
Variabel	Mean	Minimum	Maximum
IDM (indeks)	0,898963	0,8325	0,9402
Dana desa (ratus Juta)	1491,94	1.048	2.048
Bagi hasil pajak & retribusi (ratus juta rupiah)	162,188	109	259
Alokasi dana desa (ratus juta rupiah)	2.490,44	2.236	2.985
Bantuan keuangan provinsi (ratus juta rupiah)	130	130	130

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa :

- a. Apabila di rata-rata nilai Indeks Desa Membangun (IDM) seluruh desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah 0,89863. Nilai IDM terkecil ada pada Desa Waringinsari dengan nilai indek 0,8325. Nilai IDM terbesar berada di Desa Rejasari dengan nilai indeks 0,9402.
 - b. Rata-rata dana desa yang berasal dari APBN yang diterima oleh seluruh desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1491,94 ratus juta . Dana desa terkecil yaitu Rp.1.048 ratus juta diterima oleh Desa Rejasari dan dana desa terbesar Rp. 2.048 ratus juta diterima oleh Desa Cibeureum.
 - c. Rata-rata bagi hasil pajak dan retribusi yang tahun 2024 sebesar Rp. 162,188 ratus juta,- . Bagi hasil pajak dan retribusi terkecil senilai Rp.109 ratus juta ada pada Desa Sukamukti. Bagi hasil pajak dan retribusi tertinggi sebesar Rp. 259 ratus juta ada pada Desa Rejasari.
 - d. Rata-rata alokasi dana desa yang diperoleh tahun 2024 sebesar Rp. 2.490,44 ratus juta. Alokasi dana desa terkecil Rp. 2.236 ratus juta ada pada Desa Batulawang dan alokasi dana desa terbesar Rp. 2.985 ratus juta ada pada Desa Waringinsari.
 - e. Bantuan keuangan provinsi diberikan pada semua desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dengan proporsi yang sama yaitu sebesar Rp.130 ratus juta.
2. Pemeriksaan dan pengujian asumsi identik, independen, dan berdistribusi normal.
- a. Pemeriksaan dan pengujian asumsi identik atau Heterokedasitas

Pemeriksaan asumsi identik dilakukan dengan melihat residual plot pada grafik *Versus Fits* yang diolah pada *software Minitab 21* sebagai berikut:



Gambar menunjukkan bahwa titik-titik biru yang merupakan titik residual data pada grafik *Versus Fits* menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara visual residual data nilai Indeks Desa Membangun (IDM), dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa pada 16 desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 memenuhi asumsi identik.

Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi identik menggunakan Uji *Glejser* yang diolah dengan menggunakan *software Minitab 21*. Adapun hasilnya sebagai berikut.

Pengujian Asumsi Identik

Term	Coef	SE Coef	T-value	P-value
Constant	-0,0187	0,0329	-0,570	0,580

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan pengujian asumsi identik, nilai $|t_{hitung}|$ sebesar 0,570 lebih kecil dari $t_{0,025;14}$ sebesar 0,691 dan nilai P_{value} sebesar 0,580 lebih besar dari α sebesar 0,05, sehingga dapat diputuskan terima H_0 yang artinya residual data nilai Indeks Desa Membangun (IDM), dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa pada 16 desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 memenuhi asumsi identik.

- b. Pemeriksaan dan Pengujian Asumsi Independen

Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi independen menggunakan Uji *Durbin Watson* yang diolah menggunakan *software Minitab 21*. Adapun hasilnya sebagai berikut :

Hipotesis :

$H_0 : \rho_e = 0$: (Residual data nilai Indeks Desa Membangun (IDM), dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa pada 16 desa di Kota Banjar Tahun 2024 adalah independen).

$H_1 : \rho_e \neq 0$: (Residual data nilai Indeks Desa Membangun (IDM), dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa pada 16 desa di Kota Banjar Tahun 2024 adalah tidak independen).

Taraf signifikansi : $\alpha = 0,05$

Daerah penolakan : Tolak H_0 jika $d_{hitung} > d_L$

Statistik uji : $d_{hitung} = 2,18298$

Berdasarkan pengujian tersebut, nilai d_{hitung} sebesar 2,18298 lebih kecil dari dL sebesar 0,8572, sehingga dapat diputuskan terima H_0 yang artinya residual data nilai Indeks Desa Membangun (IDM), dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa pada 16 desa di Kota Banjar Tahun 2024 memenuhi asumsi independen.

c. Pemeriksaan dan pengujian asumsi berdistribusi normal

Pengujian asumsi berdistribusi normal menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dengan menggunakan *software* Minitab 21 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hipotesis :

$H_0 : F_{(x)} = F_{o(x)}$: (Residual data nilai Indeks Desa Membangun (IDM), dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa pada 16 desa di Kota Banjar Tahun 2024 berdistribusi normal).

$H_1 : F_{(x)} \neq F_{o(x)}$: (Residual data nilai Indeks Desa Membangun (IDM), dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa pada 16 desa di Kota Banjar Tahun 2024 tidak berdistribusi normal).

Taraf signifikan : $\alpha = 0,05$

Daerah penolakan : Tolak H_0 jika $KS_{hitung} > KS_{(0,05;16)}$ atau $P_{value} < \alpha$

Statistik uji : $KS_{hitung} = 0,107$, $P_{value} = 0,150$

Berdasarkan pengujian tersebut, nilai KS_{hitung} sebesar 0,107 lebih kecil dari $KS_{(0,05;16)}$ sebesar 0,32733 dan nilai P_{value} sebesar 0,150 lebih besar dari α sebesar 0,05, sehingga dapat diputuskan terima H_0 yang artinya residual data nilai Indeks Desa Membangun (IDM), dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa pada 16 desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 memenuhi asumsi berdistribusi normal.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel independen yaitu dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan provinsi terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM) pada 16 desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, namun tidak dapat dilakukan analisis regresi linear berganda pada variabel bantuan keuangan provinsi. Hal ini dikarenakan setiap desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat mendapatkan nominal yang sama. Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda.

Koefisien Variabel Independent

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	0,9899	0,0758	13,06	0,000	
DD 2024	0,000001	0,000016	0,06	0,950	1,16
Pajak_dan_Retribusi	0,000287	0,000123	2,34	0,037	1,03
Al DD 2024	0,000056	0,000023	-2,38	0,035	1,13

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan tabel di atas hasil regresi linear berganda yang diolah menggunakan *software* Minitab 21 adalah sebagai berikut

$$Y = 0,9899 + 0,000001X_1 + 0,000287X_2 + 0,000056X_3$$

Dimana :

Y : Indeks Desa Membangun (IDM)
 X_1 : dana desa
 X_2 : bagi hasil pajak dan retribusi
 X_3 : alokasi dana desa

yang artinya setiap penambahan seratus juta rupiah dana desa maka akan menambah nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,000001 poin dengan syarat variabel lain konstan. Setiap penambahan seratus juta rupiah bagi hasil pajak dan retribusi maka akan menambah nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,000287 poin dengan syarat variabel lain konstan, dan setiap penambahan seratus juta rupiah alokasi dana desa maka akan menambah nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,000056 poin dengan syarat variabel lain konstan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi linier berganda menunjukkan seberapa besar variabel independen yaitu Indeks Desa Membangun depengaruhi oleh variabel dependen seperti dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut :

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

S	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)
0,0204181	50,6%	38,34%	8,94%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Pada tabel di atas ditunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 38,34%, itu artinya dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa mempengaruhi nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 38,34% sedangkan 61,66% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Pengujian Serentak.

Pengujian Serentak Variabel Independen

Sumber Regresi	DF	SS	MS	F-value	P-value
Regresi	3	0,005139	0,001713	4,11	0,032
Galat	12	0,005003	0,000417		
Total	15	0,010142			

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 4,11 lebih besar dari $F_{0,05;(3;12)}$ sebesar 3,49 dan nilai P_{value} sebesar 0,032 kurang dari α sebesar 0,05, sehingga dapat diputuskan tolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa minimal ada satu variabel independen (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa) yang berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Oleh karena itu, analisis dapat dilanjutkan pada pengujian secara parsial.

Pengujian Parsial**Pengujian Parsial Variabel Independen**

Term	Coef	SE Coef	T-value	P-value
dana desa	0,000001	0,000016	0,06	0,950
bagi hasil pajak dan retribusi	0,000287	0,000123	2,34	0,037
alokasi dana desa	0,000056	0,000023	2,38	0,035

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Tabel menunjukkan bahwa :

- Nilai t_{hitung} pada variabel dana desa sebesar 0,06 lebih kecil dari $t_{0,025;14}$ sebesar 0,692 dan nilai P_{value} sebesar 0,952 lebih besar dari α sebesar 0,05, sehingga dapat diputuskan terima H_0 yang artinya tidak ada pengaruh signifikan dana desa terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM).
- Nilai t_{hitung} pada variabel bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 2,34 lebih besar dari $t_{0,025;14}$ sebesar 0,692 dan nilai P_{value} pada variabel bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 0,037 kurang dari α sebesar 0,05, sehingga dapat diputuskan tolak H_0 yang artinya ada pengaruh signifikan bagi hasil pajak dan retribusi terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).
- Nilai t_{hitung} pada variabel alokasi dana desa sebesar 2,38 lebih besar dari $t_{0,025;14}$ sebesar 0,692 dan nilai P_{value} pada variabel alokasi dana desa sebesar 0,035 kurang dari α sebesar 0,05, sehingga dapat diputuskan tolak H_0 yang berarti ada pengaruh signifikan alokasi dana desa terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM).

C. Pembahasan

Melalui hasil analisis regresi di atas tampak bahwa dana transfer ke desa yang terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa berpengaruh terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu sebesar 38,34%.

Dalam penelitian ini secara parsial dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Taryani (2023) yang meneliti dari sisi penyaluran dana desa. Waktu penyaluran dana desa oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sektor prioritas di desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Apabila sektor prioritas berupa fisik maka dampak dari pembangunan fisik tersebut baru akan dirasakan di tahun-tahun selanjutnya.

Penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Seliman, Yacoub dan Yani (2023) yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tatkala diteliti dengan menggunakan data panel (tahun 2017 -2021) dan efek penggunaan dana desa dilihat satu tahun berikutnya (tahun 2018 – 2022). Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Arina, Masinambow, Walewangko (2021) dengan menggunakan data panel (tahun 2016 - 2019) menerangkan bahwa dana desa berpengaruh terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM).

2. Bagi hasil pajak dan retribusi pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Seliman, Yacoub, Yani (2023) yang menyatakan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM) meski sudah dilakukan dengan menggunakan data panel (2017-2021).
3. Alokasi dana desa pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini sesuai dengan penelitian Adeliani, Rohima, Mardalena (2023) dan penelitian Arina, Masinambow dan Walewango (2021) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tanpa memperhatikan data panel atau tidak. Pendapat lain tentang alokasi dana desa dikemukakan oleh Muslihah, Siregar (2019) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa memberikan dampak terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat.
4. Selanjutnya terkait bantuan keuangan provinsi, pada prinsipnya pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Tujuan diberikannya bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa, bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum dipergunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. Selain itu peruntukan dan penggunaannya di dasarkan atas permohonan pemerintah bupati/wali kota dan pemerintah kepala desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus merupakan bantuan keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa atau digunakan untuk mempercepat pembangunan kabupaten/kota dan desa serta untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.065/PMD.05.03-PPD/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2024, menyebutkan bahwa salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah provinsi adalah dapat menugaskan desa untuk melaksanakan program pemerintah daerah provinsi dalam rangka percepatan pembangunan desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) melalui pemberian bantuan keuangan kepada Desa. Bantuan keuangan tersebut diberikan dalam rangka mewujudkan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan desa. Maksud penyelenggaraan pemerintahan desa adalah dalam upaya mendorong perwujudan kemandirian desa yang bertujuan :

- a. mewujudkan percepatan pembangunan Desa
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. mewujudkan pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan Desa.

Meski dalam penelitian ini bantuan keuangan provinsi tidak dapat diolah menggunakan *software* minitab 21 dikarenakan 16 desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat menerima bantuan keuangan provinsi dengan jumlah nominal anggaran yang sama, namun dengan berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas bantuan keuangan provinsi berperan dalam pembangunan di 16 desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, baik melalui pengujian serentak maupun parsial diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana desa tidak berpengaruh terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi hasil pajak berpengaruh terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
3. Alokasi dana desa berpengaruh terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
4. Pengaruh bantuan keuangan provinsi terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dalam penelitian ini tidak tampak secara statistik. Hal ini dikarenakan besaran bantuan keuangan provinsi yang diberikan kepada 16 desa di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat sama besarnya yaitu Rp. 130 ratus juta.
5. Secara serentak dana transfer ke desa yang terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa serta bantuan keuangan provinsi semua berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian pengaruh dana transfer ke desa terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Diperlukan suatu kajian kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran ke desa agar disesuaikan dengan kebutuhan desa.

2. Bagi Peneliti

Peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan semua variabel independent yang mempengaruhi variabel dependen sehingga hasilnya dapat lebih menggambarkan realita atau representatif.

C. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Pada penelitian ini masih mengandung keterbatasan-keterbatasan, diantaranya bahwa penelitian ini hanya meneliti dana transfer yang meliputi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa dan bantuan keuangan provinsi yang mempengaruhi nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini memiliki konsekuensi bahwa secara simultan pengaruh variabel independen (R^2) hanya sebesar 38,34%. Ini berarti masih terdapat 49,33% variabel lain yang mempengaruhi nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Oleh karena itu direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel independen yang lain yang dapat mempengaruhi nilai Indeks Desa Membangun (IDM), misalnya Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan pendapatan lain-lain.

Keterbatasan lainnya dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan waktu 1 (satu) tahun sehingga terdapat data variabel independen yang tidak dapat diproses secara statistik. Oleh karena itu direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan data *time series* agar dapat diproses secara statistik sehingga peran dari masing-masing variabel independen terhadap nilai Indeks Desa Membangun (IDM) akan nampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeliani Reza, Rohima Siti, Mardalena (2022), meneliti Pengaruh Alokasi dana desa dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Pembangunan Desa.
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewango, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22-41.
- Chaerunnisa, Yusup, D. K., Jubaedah, D., & Saepullah, U. (2020). Pengaruh Income dan Latte Factor Terhadap Daya Tahan Keuangan Kalangan Millenial di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 3.
- Halim, Affandi Rahman, Taryani Artika (2023) meneliti Pengelolaan Dana desa dan Dampaknya Terhadap Indeks desa membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51-71.
- Harjowiriyono, M. (2018), Kisah Sukses Dana Desa. Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Iftitah, Andi Eka, Wibowo, Puji, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Politeknik Keuangan Negara STAN *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Volume 48, No.1, Juni 2022, 17-36, Pengaruh Dana desa, Alokasi dana desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Indeks desa membangun di Kabupaten Gowa
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, <http://www.idm.kemendesa.go.id>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 jam 00.08 WIB
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.065/PMD.05.03-PPD/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.
- Muslihah, S., Siregar, H. O., & -, S. (2019). Dampak Alokasi dana desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 85–9
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks desa membangun. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150585/permendes-pdttno-2-tahun-2016>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
- Wardhana, Aditya, et.al (2022) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, Bandung: Media Sosial Indonesia.
- Yuvinsius Seliman, Yarlina Yacoub, Ahmad Yani (2023) yang meneliti pengaruh transfer pusat dan daerah kepada desa terhadap status Indeks desa membangun di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, Volume 8, Nomor 1, April 2023: 25-44.